



RENCANA KERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2024" dapat diselesaikan dengan baik.

RKT merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. RKT merupakan dokumen kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja. RKT Tahun 2024 berpedoman dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan tahun 2020-2024.

Ucapan terima kasih dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen RKT ini. Semoga perikanan tangkap Indonesia semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Tanjung Pandan, 23 Februari 2024
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Tanjungpandan



Arif Usman

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| DAFTAR TABEL..... | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN | 5 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 5 |
| 1.2 Visi Misi | 7 |
| 1.3 Tujuan | 9 |
| 1.4 Dasar Hukum | 9 |
| 1.5 Sasaran Program..... | 10 |
| BAB II INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 12 |
| 2.1 Target Kinerja | 12 |
| 2.2 Kerangka Pendanaan | 14 |
| 2.3 Rencana pencapaian Target Kinerja | 15 |
| BAB III PENUTUP..... | 20 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2024 | 12 |
| Tabel 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 | 14 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan bersifat indikatif. RPJMN 2020 - 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020 - 2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020 - 2024.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara – negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020 - 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya

yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, PenyederhanaanRegulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melaluitujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 - 2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Untuk itu pembangunan kelautan dan perikanan 2020 - 2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut agar dapat memberikan peranan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Pencapaian peran tersebut dilakukan dengan (1) penguatan kebijakan dan regulasi berdasarkan data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan, (2) mengoptimalkan perikanan budidaya, (3) mengembangkan perikanan tangkap, (4) membangkitkan industri kelautan dan perikanan, (5) penguatan

sistem karantina ikan, (6) pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, (7) penguatan pengawasan SDKP, (8) penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan, dan (9) penguatan reformasi birokrasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2020 - 2024 sebagai amanah dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020 - 2024. Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit utama yang mengampu program pembangunan perikanan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Selanjutnya berpedoman pada Rencana Aksi Program DJPT PPN Tanjungpandan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit utama, dan akan dilaksanakan oleh PPN Tanjungpandan melalui kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

1.2 Visi Misi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap, yaitu: Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi Pelabuhan perikanan; Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; Mengakselerasi reformasi tata Kelola dan perizinan usaha perikanan tangkap;
3. Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Pelabuhan Perikanan melaksanakan 4 (empat) misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan modal bagi nelayan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dengan menyediakan kualitas hasil tangkapan yang memenuhi standar mutu, mewujudkan konektifitas/jejaring antar Pelabuhan perikanan dalam rangka menjamis ketersediaan pasokan ikan, serta fasilitasi pelaksanaan revitalisasi industri perikanan tangkap dan penyediaan serta pemanfaatan infrastuktur/fasilitas Pelabuhan perikanan untuk menyongsong revolusi industri 4.0;

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan. Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana target

yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, maka untuk itu diperukan rencana kerja yang sistematis sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

1.3 Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 PPN Tanjungpandan adalah sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program/kegiatan tahun 2024 mulai dari penetapan kinerja, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37)
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1687).

1.5 Sasaran Program

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain:

1. **Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat**” dengan Indikator Kinerja: Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan;
2. **Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Meningkat**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat**”, dengan Indikator Kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan;
3. **Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Berdaya Saing**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat dan Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat**”, dengan Indikator Kinerja: Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Nusantara Tanjungpandan; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan;
4. **Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat**” dengan Indikator Kinerja: Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan;

5. **Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab”** dengan Indikator Kinerja: Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan;
6. **Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”** dengan Indikator Kinerja: Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan;
7. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan Indikator Kinerja : Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

BAB II INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

2.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukup pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan berupa sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan serta *cascading* dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|------------------|---|-------------------|--|----------|
| 1. | Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | 1 | Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp. Juta) | 1.835,60 |
| 2. | Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Meningkat | 2 | Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton) | 3.496 |
| 3. | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Berdaya Saing | 3 | Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | 100 |
| | | 4 | Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | 84 |
| | | 5 | Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | 27,21 |
| 4. | Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal | 6 | Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | 80 |
| | | 7 | Persentase Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | 30,10 |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|------------------|---|-------------------|--|--------|
| 5. | Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | 8 | Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal) | 130 |
| 6. | Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | 9 | Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen) | 24 |
| 7. | Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | 10 | Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | 80 |
| | | 11 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | 80 |
| | | 12 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | 94 |
| | | 13 | IP ASN Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks) | 84 |
| | | 14 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | 80 |
| | | 15 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | 80 |
| | | 16 | Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | 93,76 |
| | | 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | 86 |
| | | 18 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks) | 88,30 |

2.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target setiap sasaran strategis, PPN Tanjungpandan telah merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2024, kegiatan PPN Tanjungpandan terbagi dalam lima output kegiatan utama, yaitu:

Tabel 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | PAGU/TARGET (Rp) | |
|----|------|--|---|---------------|
| 1 | 2337 | Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan | 38.000.000 | |
| | | 2337.ACA.001 | Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan | 25.000.000 |
| | | 2337.BDC.001 | Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan | 13.000.000 |
| 2 | 2338 | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan | 1.857.200.000 | |
| | | 2338.BGA.002 | Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar | 1.212.730.000 |
| | | 2338.RAL.001 | Sarana penunjang pemungutan PNB Perikanan Tangkap yang disediakan | 67.000.000 |
| | | 2338.RBQ.001 | Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur | 577.470.000 |
| 3 | 2339 | Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan | 4.000.000 | |
| | | 2339.QDC.003 | Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya | 4.000.000 |
| 4 | 2341 | Pengelolaan Sumber Daya Ikan | 40.900.000 | |
| | | 2341.QKB.001 | Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi | 40.900.000 |
| 5 | 2342 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap | 9.863.630.000 | |
| | | 2342.CAN.955 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 281.426.000 |
| | | 2342.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 30.000.000 |
| | | 2342.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | 16.000.000 |
| | | 2342.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 8.513.811.000 |
| | | 2342.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 770.433.000 |
| | | 2342.EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | 38.000.000 |
| | | 2342.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 58.000.000 |
| | | 2342.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 35.000.000 |
| | | 2342.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | 120.960.000 |

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Output kegiatan ini adalah:
 - a. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan sebanyak 40 (empat puluh) produk melalui kegiatan pemeriksaan kelaikan dan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP).
 - b. Nelayan/awak kapal perikanan perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang melalui kegiatan sertifikasi awak kapal perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Output kegiatan ini adalah:
 - a. Layanan kepelabuhanan perikanan yang dilaksanakan.
 - b. Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar.
 - c. Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan.
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan. Output kegiatan ini adalah:
 - a. Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) dengan target 20 (dua puluh) orang.
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Output kegiatan ini adalah:
 - a. Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Dikumpulkan dan Diverifikasi dengan target 100 Laporan.
5. Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Output kegiatan ini adalah:
 - a. Dukungan manajemen internal lingkup DJPT dengan kegiatan antara lain: Layanan Perkantoran, Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Layanan Pengadaan Alat pengolah Data dan Informasi, Layanan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Laporan Keuangan dan BMN.

2.3 Rencana pencapaian Target Kinerja

1. Sasaran Program (SP – 1): Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan dengan Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Indikator Nilai PNBP merupakan penerimaan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan dengan tarif sebagaimana telah ditetapkan oleh PP 85 Tahun 2021 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realisasi Nilai PNBP PPN Tanjungpandan diukur dan dilaporkan berkala secara triwulan. Target 2024 sebesar Rp 1.835,60 Juta;

2. Sasaran Program (SP – 2): Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Indikator ini merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan dengan pelaporan bersifat triwulan dan penghitungan bersifat nilai posisi akhir. Target 2024 sebesar 3.496 Ton;
3. Sasaran Program (SP – 3) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Indikator kinerja ini dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator penilaian, yaitu 1) Hasil analisa kesesuaian permohonan pengusahaan terhadap usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan /atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan x 80%; 2) Ruang lingkup pelayanan pengusahaan yang terstandardisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20%. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target 2024 sebesar 100%.
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK DirjenPerikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2018). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi: 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri. Pengukuran capaian bersifat triwulan dengan target tahun 2024 sebesar 84.
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Indikator kinerja ini menunjukkan 1) Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%); 2) Jumlah Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%); 3) Jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Pengukuran bersifat tahunan dengan target 27,21%.

4. Sasaran Program (SP-4) Pengembangan dan peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan pengembangan fasilitas eksisting (ha) dibandingkan dengan luas pelabuhan perikanan sesuai dengan master plan (ha) x 100%. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, dengan target tahun 2024 sebesar 80%.
 - b. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Penilaian Indikator Kinerja ini berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). Penghitungan bersifat triwulan dengan target 30,10.
5. Sasaran Program (SP-5) Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan Indikator Kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (Sertifikat Kelaikan Kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Penghitungan capaian bersifat triwulan dengan nilai posisi akhir. Target tahun 2024 sebesar 130 kapal.
6. Sasaran Program (SP-6) Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Pengukuran Indikator Kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2024 sebesar 24%.
7. Sasaran Program (S-7) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Indikator kinerja ini merupakan indikator nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil Serta mengacu kea Junks Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Data Dukung berupa

lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan di unit kerja. Target indikator kinerja ini sebesar 80.

- b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator kinerja ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat bulanan dengan target 80%.

- c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator kinerja ini dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target 94.

- d. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester dengan target 84.

- e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2024 sebesar 80.

- f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2024 sebesar 80.

- g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap

regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester dengan target tahun 2024 sebesar 93,76.

h. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2024 sebesar 86.

i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Survei Kepuasan Masyarakat SKM adalah kegiatan pengukurab secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2024 sebesar 88,3.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis untuk meningkatkan PPN Prigi yang terstandar. Rencana Kerja Tahunan ini memuat semua program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan ini PPN Prigi akan lebih mudah dalam melaksanakan pengelolaan program/kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur sehingga memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di PPN Prigi dengan baik dan terencana.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

| NO. | INDIKATOR KINERJA | STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR | KEGIATAN |
|------------|--|--|--|
| 1 | Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp Juta) | Peningkatan kepatuhan stakeholder | Sosialisasi terkait aturan PNBPN |
| | | Verifikasi perhitungan PNBPN | Rekonsiliasi PNBPN |
| | | <i>Sharing</i> potensi PNBPN dengan pelabuhan perikanan lain | Melaksanakan uji tiru ke Pelabuhan Perikanan lain |
| 2 | Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton) | Melaksanakan pendataan produksi perikanan tangkap | Penyusunan jadwal piket enumerator Melaksanakan kegiatan pengumpulan data/pendataan produksi perikanan tangkap |
| | | Tersedianya data produksi perikanan tangkap yang akurat/valid | In house training bagi petugas enumerator terkait teknis pendataan dan identifikasi jenis ikan Melaksanakan pengolahan data perikanan tangkap |
| | | | Melaksanakan verifikasi dan validasi data statistik perikanan tangkap |
| | | | Koordinasi dengan pusat dan daerah terkait kegiatan validasi data |
| | | | |
| 3 | Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | Koordinasi dengan pihak pusat terkait kegiatan pengusahaan. Verifikasi dan validasi SIPAUS. | Sosialisasi pengusahaan |
| 4 | Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Melaksanakan entry data tepat waktu | Menyusun jadwal pelaksanaan <i>entry</i> data pada aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput pada aplikasi PIPP secara berkala (bulanan) |
| | | Melaksanakan koordinasi dengan seluruh tim kerjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Menyusun SK Tim Pengelolaan PIPP PPN Tanjungpandan Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pengelola PIPP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan |
| | | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait entry data PIPP | Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Entry Data PIPP secara berkala (bulanan) |
| | | | Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Evaluasi Kinerja/Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan secara berkala (bulanan) |
| 5 | Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | Meningkatnya jumlah kapal yang lengkap dokumen kapal dan dokumen perijinannya | melaksanakan fasilitas penerbitan dokumen kapal bekerjasama dengan, PSDKP, KSOP dan dokumen perizinan kapal ijin daerah bekerjasama dengan DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| | | Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan nelayan terkait kegiatan kesyahbandaran | Melaksanakan kegiatan sosialisasi kesyahbandaran |
| 6 | Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | Menyusun perencanaan dan melaksanakan pemeliharaan/pembangunan dan melaksanakan monev | Melaksanakan identifikasi kebutuhan fasilitas pelabuhan, melaksanakan kegiatan pemeliharaan/pembangunan, dan melaksanakan monev |
| 7 | Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Peningkatan kesadaran gerakan masyarakat akan pentingnya menjaga dan memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan pelabuhan | Gerakan BCL dan Sosialisasi terkait pengendalian lingkungan kawasan pelabuhan. |
| | | <i>Sharing</i> potensi pemeliharaan kawasan pelabuhan | Melaksanakan uji tiru ke Pelabuhan Perikanan lain |
| | | Peningkatan pengendalian limbah | Melaksanakan uji laboratorium dan pengukuran mandiri |
| | | Peningkatan sarana prasarana kebersihan pelabuhan | Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana K5 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 8 | Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal) | Peningkatan kesadaran pemilik kapal agar kapalnya selalu memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan | Sosiliasi kepada pemilik kapal/nakhoda terkait aspek laik laut, laik tangkap, laik simpan |
| | | Terlayannya semua kapal yang memohonkan penerbitan sertifikat kapal perikanan di PPN Tanjungpandan UPTD Binaan | penambahan petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan |
| 9 | Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan (Persen) | Meningkatkan pengetahuan/ kompetensi awak kapal perikanan | Menyusun rencana pembelajaran, matriks pembelajaran, dan pengajuan surat penebitan sertifikat awak kapal |
| | | | Menyelenggarakan Bimbingan Teknis atau Diklat Kepelautan bagi awak kapal perikanan sesuai dengan jabatan |
| | | Meningkatkan perlindungan nelayan/ awak kapal perikanan | Koordinasi dan konsultasi ke instansi pemberi jaminan sosial Asuransi danBPJS Ketenagakerjaan |
| | | | Memfasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL) |
| 10 | Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Membentuk tim kerja pembangunan ZI | Menyusun Surat Tugas Tim Pembangunan ZI PPN Tanjungpandan |
| | | Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI PPN Tanjungpandan | Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI PPN Tanjungpandan |
| 11 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | Menindaklanjuti temuan dan/atau saran pada Laporan Hasil Pengawasan dilaksanakan tepat waktu | Melaksanakan koordinasi secara terus menerus terhadap Inspektorat Jenderal KKP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan. |
| 12 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Meningkatkan pengelolaan SAKIP | Melaksanakan pengelolaan SAKIP dan melengkapi dokumen SAKIP sesuai ketentuan |
| | | | Memanfaatkan secara optimal hasil monev untuk umpan balik perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|---|
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks) | Menyusun kebutuhan pelatihan pegawai | Menyusun program <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i> |
| | | Menghimpun informasi terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi/ pelatihan | Melaksanakan kerjasama dengan BDA Sukamadi dan instansi lainnya terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi/ pelatihan |
| | | Melakukan evaluasi capaian IP ASN secara berkala | Mengadakan <i>in house training</i> Menyampaikan Capaian IP ASN secara berkala |
| 14 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | Memaksimalkan pengendalian pelaksanaan PBJ | Menyusun manajemen risiko PBJ dan melakukan pemantauan serta pengendalian secara berkala. Melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan manajemen resiko yang telah ditetapkan |
| | | 15 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) |
| Optimalisasi pemanfaatan aset | Mengusulkan penghapusan BMN yang sudah rusak | | |
| 16 | Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | | |
| | | Menyusun RPD per jenis belanja sesuai target per triwulan | Melakukan perhitungan dan menginput RPD kedalam aplikasi SAKTI |
| | | Akselerasi kegiatan dan realisasi anggaran sesuai target RPD | Melaksanakan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan ROK |
| | | Tidak terlambat pendaftaran kontraktual belanja modal nilai diatas Rp 200 juta | Pendaftaran kontraktual ke KPPN tepat waktu |
| | | Penyelesaian GUP dan PTUP tepat waktu | Pengajuan GUP dan PTUP tepat waktu |
| | | Menghindari terjadinya retur pembayaran | Melakukan verifikasi pada saat pendaftaran data supplier |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | Melakukan pengisian capaian output tepat waktu dan sesuai target | Menginput capaian output maksimal lima hari kerja pada bulan berikutnya |
| 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Menyusun RPD per jenis belanja sesuai target per triwulan | Melakukan perhitungan dan menginput RPD kedalam aplikasi SAKTI |
| | | Akselerasi kegiatan dan realisasi anggaran sesuai target RPD | Melaksanakan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan ROK |
| | | Melakukan pengisian capaian output tepat waktu dan sesuai target | Menginput capaian output maksimal lima hari kerja pada bulan berikutnya |
| 18 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks) | Meningkatkannya nilai survey kepuasan masyarakat | Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik |
| | | | Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik |
| | | | Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi terkait pelayanan publik |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------|---------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang Dikelola dan Operasional Sesuai Standar | 1.212.730.000 | Dokumen | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 5 | Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | Layanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB), Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) | 33.300.000 | Laporan | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal | 6 | Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan di UPT Pusat Sesuai Kebutuhannya | 577.470.000 | Laporan | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | 7 | Persentase Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Monitoring Tata Kelola Lingkungan di Pelabuhan Perikanan yang Diupdate secara Berkala | 237.665.000 | Laporan | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|------------|---------|-----|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|
| 5 | Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | 8 | Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal) | Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yang Diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan UPT Pusat | 25.000.000 | Kapal | 130 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 6 | Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | 9 | Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen) | Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Pengetahuan/Kompetensi dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan | 13.000.000 | Laporan | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | 10 | Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 15.000.000 | Laporan | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | 11 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 15.000.000 | Dokumen | 4 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|---------------|---------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
| | | 15 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen) | Pelaporan Sistem Akuntansi dan BMN | - | Laporan | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | 16 | Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Layanan Manajemen Keuangan | 120.960.000 | Dokumen | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai) | Layanan Manajemen Keuangan dan Perkantoran | 8.559.811.000 | Dokumen | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | 18 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks) | Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggara Pelayanan Publik | 35.000.000 | Laporan | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 |

Rincian Target Indikator
Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

| NO | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Pola Perhitungan | Frekuensi Perhitungan | Target | | | | Target 2024 |
|----|--|-------------|--------------------|-----------------------|--------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Tanjungpandan | Juta Rupiah | Nilai Posisi Akhir | Triwulan | 480,00 | 912,00 | 1.352,00 | 1.835,60 | 1.835,60 |
| 2 | Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Tanjungpandan | Ton | Nilai Posisi Akhir | Triwulan | 846,09 | 1.617,78 | 2.499,68 | 3.496,00 | 3.496,00 |
| 3 | Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Persen | Nilai Posisi Akhir | Tahunan | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Nilai | Rata-Rata | Triwulan | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 5 | Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Persen | Nilai Posisi Akhir | Tahunan | - | - | - | 27,21 | 27,21 |
| 6 | Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Persen | Nilai Posisi Akhir | Tahunan | - | - | - | 80,00 | 80,00 |
| 7 | Nilai Pengendalian Lingkungan di Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Nilai | Rata-Rata | Triwulan | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 |
| 8 | Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan | Kapal | Nilai Posisi Akhir | Triwulan | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 |
| 9 | Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan | Persen | Nilai Posisi Akhir | Tahunan | - | - | - | 24,00 | 24,00 |
| 10 | Nilai PM Pembangunan ZI Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Nilai | Nilai Posisi Akhir | Tahunan | - | - | - | 80,00 | 80,00 |
| 11 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Perikanan Nusantara | Persen | Nilai Posisi Akhir | Triwulan | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 12 | Nilai Rekonsiliasi kinerja Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Nilai | Nilai Posisi Akhir | Tahunan | - | - | - | 94,00 | 94,00 |
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN di Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Indeks | Nilai Posisi Akhir | Semesteran | - | 65,00 | - | 84,00 | 84,00 |
| 14 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Persen | Nilai Posisi Akhir | Tahunan | - | - | - | 80,00 | 80,00 |
| 15 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Persen | Nilai Posisi Akhir | Tahunan | - | - | - | 80,00 | 80,00 |
| 16 | Nilai IKPA Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Nilai | Nilai Posisi Akhir | Semesteran | - | 83,00 | - | 93,76 | 93,76 |
| 17 | Nilai Kinerja Anggaran Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Nilai | Nilai Posisi Akhir | Tahunan | - | - | - | 86,00 | 86,00 |
| 18 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Perikanan Nusantara Tanjungpandan | Indeks | Nilai Posisi Akhir | Triwulan | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 |